

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Hasil pada pemilihan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 sebanyak 36 perusahaan, sehingga selama periode pengamatan 2013-2015 diperoleh jumlah data observasi sebanyak 58. Proses pemilihan sampel dalam penelitian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Perusahaan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Jumlah
1	Perusahaan yang bergerak disektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	149	149	149	447
2	Perusahaan manufaktur yang <i>delisting</i> tahun 2013-2015	0	0	2	(2)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak menyediakan laporan tahunan atau <i>annual report</i> di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015	36	18	20	(74)
4	Perusahaan manufaktur yang memiliki laba negatif/rugi	34	30	37	(101)

5	Perusahaan manufaktur yang tidak mengungkapkan informasi tentang <i>Good Corporate Governance</i> (dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit) dalam laporan keuangan	26	42	38	(106)
6	Perusahaan terpilih sebagai sampel	53	52	59	164
7	Outlier				(106)
8	Observasi total periode penelitian				58

B. Uji Kualitas dan Instrumen Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Statistik Deskriptif

Panel A

		Fasilitas Perpajakan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Terdapat Fasilitas Perpajakan	39	67,2	67,2	67,2
	Terdapat Fasilitas Perpajakan	19	32,8	32,8	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

Tabel 4.2 Panel A menunjukkan bahwa dari 58 observasi, sebanyak 39 observasi dengan persentase sebesar 67,2% tidak mendapatkan fasilitas perpajakan, kemudian 19 observasi dengan persentase 32,8% mendapatkan fasilitas perpajakan.

Panel B

Ringkasan Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
Dewan Komisaris	58	2	11	3,98	3,00	1,969
Komisaris						
Independen	58	,1667	,8000	,397783	,333300	,1352388
Kepemilikan						
Manajerial	58	,0000	,8499	,200064	,086350	,2734747

Komite Audit	58	2	4	3,02	3,00	,296
Fasilitas Perpajakan	58	0	1	,33	,00	,473
Intensitas Aset						
Tetap	58	,0000	,8616	,364534	,337750	,1990872
Effective Tax Rate	58	,1899	,3123	,249371	,251200	,0250921
Valid N (listwise)	58					

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Tabel 4.2 Panel B menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris memiliki mean sebesar 3,98 dengan standar deviasi 1,969 dan median 3,00. Dewan Komisaris pada penelitian ini banyak karena nilai mean berada diatas nilai median. Variabel komisaris independen memiliki mean sebesar 0,397783 dengan standar deviasi 0,1352388 dan median 0,333300. Komisaris Independen pada penelitian tergolong banyak karena nilai mean diatas nilai median. Selanjutnya untuk variabel kepemilikan manajerial memiliki mean sebesar 0,200064 dengan standar deviasi 0,2734747 dan median 0,086350. Kepemilikan manajerial pada penelitian tinggi karena nilai mean diatas nilai median.

Pada variabel komite audit memiliki nilai mean 3,02 dengan standar deviasi 0,296 dan median 3,00. Komite audit pada penelitian ini banyak karena nilai mean diatas nilai median. Pada variabel fasilitas perpajakan memiliki nilai mean 0,33 dengan standar deviasi 0,473 dan median 0,00. Fasilitas perpajakan pada penelitian ini ditunjukkan dengan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan nilai 1 untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mendapat fasilitas perpajakan

lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan.

Intensitas asset tetap pada penelitian ini memiliki nilai mean 0,364534 dengan standar deviasi 0,1990872 dan median 0,337750. Intensitas asset tetap pada penelitian ini banyak karena nilai mean berada diatas nilai median. Untuk variabel dependen *tax planning* yang diproksikkan dengan *effective tax rate* (ETR) pada statistik deskriptif memiliki nilai mean 0,249371 dengan standar deviasi 0,0250921 dan nilai median 0,251200. Tingkat penghindaran pajak tergolong rendah karena nilai mean lebih rendah dari nilai median.

C. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini agar model regresi yang diperoleh menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (*best linier-unbias estimator/blue*).

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan metode uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (KS) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01562418
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,068

	Negative	-,084
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh pada tabel diatas sebesar $0,200 > 0,05$ artinya data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Ringkasan hasil uji multikolinieritas menggunakan metode variance inflation factor (VIF) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collenearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
DEKOM	,539	1,856	Non Multikolinearitas
KOMINDP	,864	1,158	Non Multikolinearitas
KEPMAN	,777	1,286	Non Multikolinearitas
CA	,535	1,871	Non Multikolinearitas
FASPJ	,806	1,241	Non Multikolinearitas
INTAT	,689	1,452	Non Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk variabel dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, fasilitas perpajakan dan intensitas aset tetap secara keseluruhan memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai

$tolerance > 0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Ringkasan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Dependen	Variabel Independen	Sig.t	Keterangan
ABS_RES	DEKOM	,140	Non Heteroskedastisitas
	KOMINDP	,913	Non Heteroskedastisitas
	KEPMAN	,512	Non Heteroskedastisitas
	CA	,867	Non Heteroskedastisitas
	FASPJ	,525	Non Heteroskedastisitas
	INTAT	,349	Non Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai sig pada variabel dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, fasilitas perpajakan dan intensitas aset tetap menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolute residual karena nilai sig $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non heteroskedastisitas telah terpenuhi.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.6
Ringkasan Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,782 ^a	,612	,567	,0165177	1,899

a. Predictors: (Constant), Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Fasilitas Perpajakan, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit

b. Dependent Variable: Effective Tax Rate

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Tabel 4.6 menunjukkan nilai DW-test yang diperoleh sebesar 1,899 berada diantara angka -2 sampai +2 berarti tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi.

D. Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7
Hasil Uji Nilai t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	,362	,029		12,565	,000	
DEKOM	,002	,002	,145	1,219	,228	DITOLAK
KOMINDP	-,051	,017	-,273	-2,907	,005	DITERIMA
KEPMAN	,001	,009	,012	,124	,902	DITOLAK
CA	-,041	,010	-,486	-4,072	,000	DITERIMA
FASPJ	-,009	,005	-,178	-1,835	,072	DITOLAK
INTAT	,075	,013	,596	5,669	,000	DITOLAK

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0,362 + 0,002 \text{ DEKOM} - 0,051 \text{ KOMINDP} + 0,001 \text{ KEPMAN} - 0,041 \text{ CA} - 0,009 \text{ FASPJ} + 0,075 \text{ INTAT} + e$$

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel dewan komisaris (DEKOM) memiliki nilai t sebesar 1,219 dengan koefisien regresi positif 0,002 dan p-value (sig) sebesar $0,228 > \alpha$ (0,05), berarti dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap *tax planning*, sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel komisaris independen (KOMINDP) memiliki nilai t sebesar -2,907 dengan koefisien regresi negatif -0,051 dan p-value (sig) sebesar $0,005 < \alpha$ (0,05), berarti komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax planning*, sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel kepemilikan manajerial (KEPMAN) memiliki nilai t sebesar 0,124 dengan koefisien regresi positif 0,001 dan p-value (sig) sebesar $0,902 > \alpha$ (0,05), berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap *tax planning*, sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

d. Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel komite audit (CA) memiliki nilai t sebesar -4,072 dengan koefisien regresi negatif -0,041 dan p-value (sig) sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05),

berarti komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax planning*, sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima.

e. Pengujian Hipotesis Kelima

Variabel fasilitas perpajakan (FASPJ) memiliki nilai t sebesar -1,835 dengan koefisien regresi negatif -0,009 dan p-value (sig) sebesar $0,072 > \alpha (0,05)$, berarti fasilitas perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap *tax planning*, sehingga hipotesis kelima (H_5) ditolak.

f. Pengujian Hipotesis Keenam

Variabel intensitas aset tetap (INTAT) memiliki nilai t sebesar positif 5,669 dengan koefisien regresi positif 0,075 dan p-value (sig) sebesar $0,000 > \alpha (0,05)$, berarti intensitas aset tetap tidak berpengaruh negatif terhadap *tax planning*, sehingga hipotesis keenam (H_6) ditolak.

2. Uji Signifikansi F (F-test)

Tabel 4.8
Hasil Uji Nilai F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,022	6	,004	13,423	,000 ^b
	Residual	,014	51	,000		
	Total	,036	57			

a. Dependent Variable: Effective Tax Rate

b. Predictors: (Constant), Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Fasilitas Perpajakan, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Hasil perhitungan pada tabel 4.8 diperoleh nilai sig. F (p-value) sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan

manajerial, komite audit, fasilitas perpajakan dan intensitas aset tetap secara simultan berpengaruh terhadap *tax planning*.

3. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,782 ^a	,612	,567	,0165177	1,899

a. Predictors: (Constant), Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Fasilitas Perpajakan, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit

b. Dependent Variable: Effective Tax Rate

Sumber: Hasil olah data, 2017.

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,567 atau sekitar 56,7% variasi *tax planning* dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, fasilitas perpajakan dan intensitas aset tetap. Sedangkan sisanya 43,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

E. Pembahasan (Interpretasi)

Penelitian ini menguji apakah dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, fasilitas perpajakan dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax planning*. Pengujian terhadap beberapa hipotesis pada penelitian ini sudah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa H₂ dan H₄ diterima sedangkan H₁, H₃, H₅, dan H₆ ditolak.

1. Dewan Komisaris Terhadap *Tax Planning*.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) **ditolak**. Banyaknya jumlah dewan komisaris tidak mempengaruhi manajer melakukan *tax planning* pada sebuah perusahaan. Hal tersebut disebabkan perusahaan yang berskala besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris lebih banyak dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Perusahaan yang berskala besar tentu lebih membutuhkan penasihat yang lebih banyak (Meilinda, 2013).

Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak, khususnya diharapkan akan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan Novitasari (2016), Gunawan (2016) dan Annisa (2011) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *tax planning* perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Situmorang (2015) yang mengatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax planning*.

2. Komisaris Independen Terhadap *Tax Planning*.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang menguntungkan perusahaan akan tetapi tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak (Situmorang, 2015).

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) **diterima**. Tingginya jumlah komisaris independen dalam sebuah perusahaan berpengaruh terhadap *tax planning*. Adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham karena komisaris independen bertugas mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar mampu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Jika tujuan perusahaan tercapai, memiliki kinerja yang efektif dan terjalin hubungan baik antara manajer dan pemegang saham membuat manajer tidak perlu melakukan *tax planning*, karena segala kegiatan perusahaan diawasi oleh komisaris independen.

Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Maharani dan Ketut (2014) mengatakan bahwa besarnya jumlah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax planning* pada sebuah perusahaan.

3. Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Planning*.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudito (2015) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung manajer melakukan *tax planning*.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) **ditolak**. Besarnya keinginan manajer untuk mendapatkan laba yang maksimal dan untuk memuaskan *stakeholders* membuat manajer menghalalkan berbagai cara termasuk melakukan *tax planning*. Manajer yang mempunyai saham memiliki kepentingan pribadi yaitu adanya *return* yang diperoleh dari kepemilikan sahamnya pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi laba dan beban pajak baik dalam bentuk menaikkan laba maupun dengan menurunkan laba demi kepentingannya tersebut. Sehingga banyaknya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial maka tidak mempengaruhi *tax planning*.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2015) dan Bachtiar (2015) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial

tidak berpengaruh terhadap *tax planning*. Penelitian yang dilakukan keduanya diperkuat oleh hasil penelitian Rachmawati (2016) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax planning* perusahaan.

4. Komite Audit Terhadap *Tax Planning*.

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Dewan komisaris membentuk komite-komite untuk menjalankan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggungjawab terhadap dewan komisaris (Situmorng, 2015).

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) **diterima**. Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin rendah peluang manajer melakukan *tax planning*. Banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Komite audit berdasarkan fungsinya tersebut membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Keberadaan komite audit membuat perusahaan lebih bertanggungjawab dan terbuka dalam pembuatan laporan keuangan karena komite audit sebagai fungsi pengawasan segala kegiatan yang berlangsung didalam perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jantra (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax planning* perusahaan. Selain itu hasil penelitian Maharani dan Ketut (2014) juga mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax planning* perusahaan.

5. Fasilitas Perpajakan Terhadap *Tax Planning*.

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Hasil penelitian yang dilakukan Kristanto (2015) bahwa fasilitas perpajakan melalui penurunan tarif pajak penghasilan badan memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan pajak (*tax planning*). Jika beban pajak terutang yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan *tax planning* untuk menekan beban pajaknya.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H_5) **ditolak**. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan maupun perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax planning*. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan akan tetap melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak jika beban pajak yang dibayarkan perusahaan masih memberatkan perusahaan. Perusahaam melakukan efisiensi PPh Badan dengan beberapa cara legal guna memperkecil beban pajak untuk meminimalkan PPh

terutang. Semua perusahaan pasti menginginkan laba yang maksimal dan melakukan segala cara untuk mendapatkan laba yang maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Rachmawati (2016) menemukan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax planning* perusahaan.

6. Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Planning*.

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini yaitu intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Hasil penelitian Darmadi (2013) menemukan bahwa intensitas aset tetap pada sebuah perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax planning*. Intensitas aset tetap sebagai pengurang beban pajak karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang lebih banyak/memiliki aset yang besar akan memiliki Tarif Pajak Efektif yang rendah.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H_6) **ditolak**. Tingginya intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Semakin tingginya intensitas aset tetap pada perusahaan maka ETR juga semakin tinggi, sehingga *tax planning* cenderung akan menurun. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis dan beban depresiasi yang berbeda-beda, sehingga penyimpanan aset tetap yang besar bukan semata-mata untuk menghindari pajak akan tetapi untuk menjalankan operasional perusahaan. Besarnya kepemilikan aset tetap tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal mengurangi

pembayaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Dharma (2016) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax planning*.